

## TEOLOGI PUBLIK DAN PRAKSIS PENGEMBANGANYA DALAM PASTORAL PARIWISATA DI KEUSKUPAN RUTENG

**Benediktus Denar & Paulus Tolo**

STIPAS St. Sirilus Ruteng

[Bennydenar@yahoo.com](mailto:Bennydenar@yahoo.com)

STIPAS St. Sirilus Ruteng

[paulustolo@gmail.com](mailto:paulustolo@gmail.com)

### ***Abstract***

*This article specifically describes the model of public theology development played by the Catholic Church of the Diocese of Ruteng in responding to the destructive impacts of tourism development in Labuan Bajo - West Flores. The main issue that will be described in this article is that there are a number of destructive impacts in the development of the Labuan Bajo tourism industry that sacrifice the interests and lives of local people. The development of Labuan Bajo tourism only provides benefits for business actors and state actors, while the local community must bear the burden of destruction due to tourism development. On the other hand, the public role of the Church has not been so significant. The research method used to elaborate this article is a qualitative study with a contextual theological paradigm and approach. The results of the study conclude that the public role of the Church by prioritizing the concepts and messages of public theology is very important for establishing a just tourism development model, especially for the local community in Labuan Bajo.*

***Keywords: justice, public theology, Ruteng diocese, tourism***

### **Pendahuluan**

Pengembangan teologi publik yang diperankan oleh Gereja Katolik Keuskupan Ruteng sangat penting dalam mengusahakan konsep dan praksis pembangunan pariwisata yang berkeadilan bagi masyarakat lokal di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Perjuangan berbasis pesan-pesan publik teologi kristiani tersebut demikian krusial karena dalam kenyataan narasi dan praktik pengembangan pariwisata Labuan Bajo tidak saja membawa harapan akan kemajuan dan kesejahteraan, tetapi juga disertai praktik-praktik pembangunan yang membawa bias pengucilan dan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat lokal (Kurniawan & Primawardani, 2013). Pengembangan pariwisata yang kerap dinarasikan sebagai jalan menuju kesejahteraan, dalam kenyataan justru menelan biaya-biaya manusiawi yang tidak ringan yang harus ditanggung warga lokal. Laju kemajuan yang diusung hampir linear dengan penguasaan sumber daya dan ruang hidup warga lokal, degradasi lingkungan, serta berbagai kompleksitas persoalan lainnya.

Beragam studi menunjukkan bahwa pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, kerena beragam efek yang ditimbulkannya. Secara positif, pengembangan pariwisata memiliki efek jamak (*multiplier effects*). Di sektor ekonomi, pariwisata dapat meningkatkan

pendapatan pemerintah, menyerap tenaga kerja, menyehatkan neraca perdagangan, serta membuka akses yang luas dalam berwirausaha (Pitana & Ketut, 2009; Febriana & Pangestuti, 2018). Dalam aspek budaya, industri pariwisata dapat merangsang usaha pemeliharaan dan revitalisasi terhadap produk-produk (monumen-monumen) kebudayaan, termasuk mendorong kebangkitan kekayaan budaya tradisional (Hamid, 2016).

Dampak positif yang dinarasikan tersebut tentu saja ada benarnya. Namun patut juga diperhitungkan bahwa berbarengan dengan dampak positif, industri pariwisata ternyata turut serta membawa bias-bias destruksi yang tidak ringan. Destruksi-destruksi tersebut antara lain terjadinya komodifikasi atas tanah, liberalisasi perdagangan yang berpotensi merugikan produk lokal, menguatnya ketidakpastian investasi, serta meningkatnya biaya hidup penduduk lokal (Pitana & Ketut, 2009). Studi Febriana dan Pangestuti (2018) memperlihatkan pengembangan industri pariwisata seringkali diikuti distribusi pendapatan yang tidak merata. Hal tersebut ditandai munculnya minoritas orang kaya yang mendapat akses keuntungan dari industri pariwisata, sedangkan mayoritas masyarakat tidak mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.

Secara spesifik, dalam konteks pengembangan pariwisata Labuan Bajo, beragam studi memperlihatkan kuatnya dominasi asing atas masyarakat lokal, atas nama pembangunan pariwisata (Klimmek, 2013; Kodir et al., 2020). Dominasi yang demikian mengakar itu diperparah oleh minimnya proteksi terhadap kepentingan masyarakat lokal (Cole, 2017; Nudan, 2020). Bahkan terdapat studi yang menyimpulkan pengembangan pariwisata Labuan Bajo lebih bercorak oligarkis-kapitalistis yang nyata dalam semakin masifnya pengambilalihan sumber daya publik dan sumber daya masyarakat lokal oleh kepentingan korporasi yang ditopang oleh regulasi negara (Afioma, 2016). Hal tersebut menyebabkan terjadinya apa yang disebut dalam ungkapan khas masyarakat lokal (Manggarai); *Long ata lonto, lonto ata long*. Ungkapan ini memiliki makna masyarakat lokal menjadi orang asing di tanahnya sendiri, sementara pendatang menjadi tuan atau penguasa. Pendatang dalam hal ini adalah pebisnis raksasa yang ditopang oleh kekuatan politik yang sungguh-sungguh menguasai dan menghegemoni masyarakat lokal.

Gereja Lokal Keuskupan Ruteng menaruh perhatian terkait persoalan-persoalan seputar pariwisata ini. Dalam Sinode III (Tahun 2013-2015) Keuskupan Ruteng, problem terkait kepariwisataan juga menjadi sorotan. Industri pariwisata dilihat mengancam eksistensi dan identitas kehidupan masyarakat lokal. Hal ini ditandai sentra pariwisata yang dikuasai oleh orang luar, sementara penduduk lokal kehilangan sumber daya, sehingga

menjadi tamu di daerahnya sendiri. Selain itu, pariwisata dengan kultur asing menguasai gaya hidup sosial, sehingga mengancam identitas kultural warga lokal (Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, 2017).

Artikel ini berusaha menunjukkan keterlibatan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng dalam persoalan seputar ketidakadilan pengelolaan pariwisata super premium Labuan Bajo. Keterlibatan Gereja Keuskupan Ruteng tersebut dianalisis dari tinjauan teologi publik. Teologi publik yang dimaksudkan adalah teologi yang berkontribusi pada kehidupan publik dengan membawa pesan sosial dan profetik dari ajaran Yesus Kristus (Wilfred, 2010, p. 191; Levesque, 2014). Teologi yang menolak kecenderungan memahami agama hanya memiliki relevansi pada kehidupan privat penganutnya, namun mengabaikan implikasi sosial politis hidup beriman (Sunarko, 2016). Teologi yang senantiasa mengkritisi adanya bahaya marginalisasi dan privatisasi iman dan teologi itu sendiri.

Teologi publik merupakan usaha merefleksikan dan memberi interpretasi terhadap persoalan masyarakat (publik) dalam terang kehendak Ilahi (Pakpahan, 2020). Dalamnya, teologi terlibat dalam wacana publik dan berusaha memberi kontribusi bagi kebaikan bersama sebagai sebuah polis. Keterlibatan tersebut merupakan bagian dari cara memaklumkan Kerajaan Allah dan terutama agar Kerajaan Allah tersebut hadir secara aktual, relevan, dan signifikan dalam nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sebagai sebuah usaha melibatkan diri dalam pergulatan warga, teologi publik umumnya membahas dan menganalisis tema-tema publik seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Semua itu dianalisis dalam terang ilahi, yakni melalui interpretasi kontekstual atas Kitab Suci dan tradisi Gereja. Di sini dibutuhkan pendekatan metodologis yang interdisipliner (Wilfred, 2010, p. 256).

Teologi publik bersumber dari inkarnasi Kristus dan tentu saja membawa karakter inkarnatoris Gereja. Kisah Yesus memberikan pertolongan kepada perempuan Kanaan (Mat. 15:21-28) dan perwira bangsa Romawi (Luk. 7:1-10), merupakan bukti keterbukaan Allah terhadap situasi aktual manusia (Firmanto, 2017). Dengan demikian, jati diri para murid Kristus sebagai “garam dunia” dan “ragi masyarakat” (Mat. 5:13-16; Luk. 13:21) memperlihatkan panggilan Gereja bahwa dia bukanlah komunitas tertutup, tetapi senantiasa berada di tengah dunia dengan segala pergumulan dan tantangannya. Panggilan para murid Kristus sebagai “ragi yang mengkhamiri adonan” (1 Kor 5:6) menunjukkan kesalingterkaitan antara keberadaan Gereja dengan dinamika hidup masyarakat. Dengan demikian, “apabila Gereja menemukan jati dirinya dalam Sabda Allah yang menjadi manusia dalam totalitas eksistensi Kristus, maka seperti Kristus, Gereja pun harus berani mengalami

nasib menjadi korban untuk mewartakan Kerajaan Allah yang memerdekakan” (Firmanto, 2017).

Teologi publik didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Pertama, teologi publik bersandar pada asumsi bahwa refleksi teologi tidak hanya untuk tujuan pribadi, tetapi menjadikan seluruh komunitas sebagai audiensnya (Haire, 2007). Jadi, ada keyakinan bahwa teologi relevan untuk konteks persoalan, diskusi, dan komunitas manapun. Dalam konteks Asia, menurut Wilfred, teologi publik tidak seperti teologi publik Barat, yakni keterlibatan intra-agama, tetapi di Asia harus benar-benar bersifat publik, antar-agama (Wilfred, 2010, p. xix). Kedua, teologi publik mengasumsikan adanya penolakan terhadap keyakinan filsafat Abad Pencerahan yang mengatakan negara menjadi satu-satunya institusi publik yang mengatur kebaikan umum (Levesque, 2014). Sebab dalam kenyataan, ruang publik tanpa agama (teologi) justru semakin buruk. Politik dan bisnis tanpa nilai-nilai agama (teologi) justru melahirkan *leviathan* baru, di mana warga yang kuat memangsa warga lainnya yang lemah. Keyakinan Abad Pencerahan bahwa negara (tanpa agama/teologi) menjadi juru selamat warga dari perang “semua melawan semua” terbukti hanya menjadi konstruksi manusia yang dengan mudah terbantahkan (Levesque, 2014).

Terdapat dua rumusan masalah utama yang dibahas dalam artikel ini yaitu; pertama, bagaimana bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo terhadap warga lokal? Kedua, bagaimana model pengembangan teologi publik yang dilakukan oleh Gereja Lokal Keuskupan Ruteng bagi terciptanya model pengelolaan pariwisata yang berkeadilan bagi masyarakat lokal? Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi bagi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo; dan menganalisis model pengembangan teologi publik yang dilakukan oleh Gereja Keuskupan Ruteng bagi usaha terciptanya tata kelola pariwisata berkeadilan bagi masyarakat lokal di Labuan Bajo.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Studi kualitatif tersebut dikembangkan dalam paradigma dan pendekatan teologi kontekstual (Bevans, 2002). Data diperoleh dari observasi langsung yang dilakukan peneliti sendiri. Hal ini dilakukan dengan mudah karena peneliti merupakan imam (pastor) di Keuskupan Ruteng yang turut menjalankan program pastoral Keuskupan Ruteng selama ini. Selain itu, penulis adalah warga masyarakat Manggarai yang turut menyaksikan dan merasakan dampak

pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Selain observasi langsung, penulis juga memperoleh data dari informan melalui wawancara dan angket penelitian. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampling jenis ini adalah sampling non-probabilitas yang di dalamnya unit-unit (subjek) yang dijadikan informan diseleksi atas dasar penilaian atau kriteria peneliti sendiri (Berg, 2001: 32; Sugiyono, 2009: 120). Dalam penelitian ini, informan utama dipilih dari kelompok masyarakat di sekitar wilayah pengembangan industri pariwisata Labuan Bajo dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda (PNS, pelaku pariwisata, pelaku UMKM, Petani dan Pelajar) dan merupakan warga Gereja Katolik.

Setelah data-data terkumpul, baik dari pengamatan maupun dari wawancara mendalam, maka penulis melakukan analisis dan interpretasi secara kualitatif. Adapun tahap-tahap dalam melakukan interpretasi adalah pertama dengan melakukan pengelompokkan terhadap data ke dalam sub-sub tema sesuai dengan arah yang hendak dituju penulis. Selanjutnya, data-data tersebut diseleksi untuk mengeluarkan data-data yang tidak relevan dan data-data yang diulang (*overlapping*). Data yang dianggap belum memadai atau kurang jelas dicari dan diperdalam kembali. Kemudian data-data yang telah terkodifikasi dan sudah direduksi, diinterpretasi atau dianalisis dan akhirnya disusun dalam bentuk suatu narasi deskriptif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Bentuk-Bentuk Ketidakadilan terhadap Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo**

Dampak destruktif pengembangan pariwisata Labuan Bajo mencakup banyak aspek. Namun, penelitian ini memfokuskan diri pada aspek budaya dan religi, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan hidup (ekologi). *Pertama*, aspek budaya. Pengelolaan pariwisata tanpa mengindahkan kearifan budaya dan tradisi lokal telah menyebabkan degradasi budaya yang dialami masyarakat lokal. Tata kelola pariwisata yang sekadar berorientasi pertumbuhan ekonomi menyebabkan masyarakat lokal harus mengalami kegersangan budaya. Terdapat fenomena ekonomisasi kehidupan di mana segala sesuatu (termasuk tradisi dan budaya) harus diabaikan atau dikorbankan jika tidak bernilai ekonomi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan terdapat 49 % informan menyatakan bahwa tata kelola pariwisata Labuan Bajo telah menyebabkan tergerusnya unsur-unsur budaya dan kebijakan tradisi masyarakat lokal. Temuan tersebut membenarkan berbagai studi sebelumnya bahwa industri

pariwisata di satu sisi memang berdampak positif bagi pengembangan budaya, namun di sisi lain membawa bias-bias destruktif bagi kebudayaan masyarakat lokal. Studi Sihite (2000:76), misalnya, menyebutkan industri pariwisata menyebabkan tergerusnya budaya lokal yang ditandai adanya gagasan dan praktik hidup yang mendasarkan kemajuan pada budaya kolonial. Praktik hidup dan kearifan-kearifan lokal pelan-pelan digeser oleh pola dan gaya hidup yang mendukung industri pariwisata. Hal tersebut berisiko lenyapnya daya ingat sosial (*social memory*), termasuk kebijakan-kebijakan kultural yang mendukung kohesi sosial. Akibat lanjutannya adalah semakin gampangya potensi bagi munculnya disintegrasi dan bahkan konflik antar-warga. Sementara mekanisme resolusi konflik yang berakar pada kebijakan tradisi semakin lama semakin memudar (Kiwang & Arif, 2020). Padahal, budaya dan tradisi lokal merupakan representasi dari pengetahuan dan kearifan lokal yang dapat berperan sebagai salah satu faktor penguat bagi terjalinnya relasi yang harmonis dalam masyarakat, termasuk relasi sosial lintas agama dan lintas budaya (Riyadi, 2021). Selain itu, terjadi hegemonisasi budaya, di mana budaya lokal dianggap sebagai penghambat laju kemajuan pariwisata. Akibatnya, generasi muda mengalami ketercerabutan dari akar budayanya. Dampak paling drastis adalah terjadi deskralisasi terhadap tanah dan alam lingkungan. Akibatnya masyarakat tanpa rasa bersalah mengkomersialisasi dan mengkomodifikasi tanah yang diwariskan nenek moyangnya sendiri. Tindakan-tindakan yang dahulu dianggap sebagai 'tabu' seperti merusakkan hutan dan mata air, kini dirasakan sebagai hal biasa.

*Kedua*, aspek ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan pariwisata super premium Labuan Bajo yang hanya didominasi oleh kolaborasi pemerintah pusat dengan para pemodal telah menyebabkan sumber-sumber ekonomi masyarakat lokal kian terancam. Terdapat 64 % informan menilai sumber-sumber ekonomi masyarakat lokal semakin terancam. Temuan tersebut mengafirmasi studi-studi sebelumnya bahwa industri pariwisata memang di satu sisi membawa dampak positif (Febriana & Pangestuti, 2018; Pitana & Ketut, 2009, 185–188), namun di sisi lain rentan menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi dirasakan oleh masyarakat lokal karena sumber daya hidup mereka diambil sebagai lahan bisnis pariwisata kelas atas, sementara masyarakat lokal disingkirkan (Walpole & Goodwin, 2000). Bahkan atas nama konservasi dan bisnis pariwisata, ruang gerak ekonomi dibatasi. Masyarakat yang mendiami Pulau Komodo misalnya dipaksa untuk hanya berdiam di wilayah sekitar 17 hektar saja, sementara tanah mereka dikuasai, aktivitas berkebun dan melaut dibatasi. Padahal mereka telah mendiami Pulau Komodo jauh sebelum Indonesia merdeka. Di sisi lain, pulau Komodo yang

sebelumnya ditetapkan pemerintah sebagai kawasan konservasi dan atas nama konservasi aktivitas ekonomi masyarakat dibatasi, justru kini diberikan kepada investor untuk dikuasai secara ekonomi. Masyarakat yang sebelumnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, kini dipaksa bekerja di sektor pariwisata. Padahal mereka tidak memiliki kebiasaan dan kecakapan dalam sektor tersebut. Akibatnya mereka kalah bersaing dengan tenaga terampil dan terdidik yang didatangkan dari luar. Sementara di wilayah daratan, terutama di Labuan Bajo dan sekitarnya, pengambilalihan aset masyarakat lokal sangat masif terjadi. Yang paling kelihatan adalah tanah. Sebagian besar tanah di Labuan Bajo jatuh kepada pemodal asing dan pengusaha-pengusaha raksasa. Konflik agraria tak terhindarkan. Dalam banyak kasus, pengusuran paksa atas tanah warga atas nama proyek strategis nasional seringkali terjadi. Pembangunan fasilitas pariwisata seringkali dengan mengorbankan lahan warga (Ama, 2022). Lembaga yang dibentuk pemerintah pusat yang diberi nama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) seringkali ditentang warga karena dalam praktiknya kerap menguasai lahan masyarakat (Tedy N, 2022). Mirisnya, dalam berbagai pemberitaan, warga yang menolak ditangkap oleh aparat negara (*Tolak Penggusuran, Warga Labuan Bajo Ditangkap Polisi, 2022; Sengketa Lahan Pariwisata, Warga Labuan Bajo Ditangkap Polisi, 2022*).

Dengan pengambilalihan ruang hidup, maka masyarakat lokal terjungkal dari tanah leluhurnya sendiri (Timothy & Tosun, 2003). Tata kelola pembangunan pariwisata yang semakin terlihat berwatak neoliberal (Herry-Priyono, 2004), telah menyebabkan warga lokal kehilangan akses ke sumber daya ekonomi yang diwariskan leluhurnya sendiri. Tata kelola ekonomi yang telah terglobalisasi tersebut menyebabkan konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik ke beberapa tangan dan perusahaan transnasional. Dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan mengerahkan tenaga kekuasaan, mereka memanfaatkan kontrol untuk memandu pasar liberal global. Mereka mengganggu dan menghancurkan produksi dan pasar lokal, mendikte kondisi kerja, mengeksploitasi orang miskin dan amat sering melanggar hak asasi manusia. Keserakahan akan keuntungan dan pertumbuhan tak terbatas juga meningkatkan ketimpangan dan mengarah kepada proses pengembangan ekonomi asimetris di mana rakyat kecil dan tak berdaya diperhadapkan secara tak seimbang dengan kekuatan raksasa korporasi yang didukung pemerintah. Model pengelolaan ekonomi ini menyebabkan terjadinya konsentrasi pengambilan keputusan, tanpa disertai penghargaan atas prinsip partisipasi, subsidiaritas dan inklusivitas.

*Ketiga*, aspek ekologis. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan pariwisata super premium Labuan Bajo dihantui oleh minimnya komitmen pemerintah

untuk melaksanakan pembangunan berbasis ekologi di kawasan pariwisata. Hal ini terkonfirmasi dalam temuan penelitian yang memperlihatkan 32 % informan yang menyatakan pengembangan pariwisata super premium Labuan Bajo cenderung merusak lingkungan hidup. Bahkan sebanyak 62 % informan menyatakan bahwa pengembangan pariwisata super premium Labuan Bajo berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Tata kelola pariwisata yang serampangan tanpa memperhatikan keadilan ekologis menyebabkan warga miskin harus membayar mahal terhadap akses untuk mendapatkan kebutuhan dasar, seperti air bersih. Golongan masyarakat yang paling terdampak dari kurangnya akses mendapatkan air bersih adalah wanita. Penelitian Stroma Cole menunjukkan perkembangan pariwisata di Labuan Bajo telah secara dramatis meningkatkan biaya hidup terutama biaya untuk mendapatkan air bersih (Cole, 2017). Hal itu mendorong perempuan masuk dalam mekanisme kerja berbayar yang eksploitatif dan melipatgandakan beban mereka, karena mereka harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga yang membutuhkan air. Masih banyak juga persoalan lain yang menunjukkan betapa ambisi membangun kawasan super premium harus dibayar mahal dengan adanya praktik ketidakadilan ekologis. Semua itu menimbulkan kerentanan fisik (seperti pemanasan global, banjir, kekeringan, penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan), juga kerentanan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, kesulitan akses terhadap sumber daya, dan kesehatan (Rusmadi, 2016).

### **Peran Publik Teologi dalam Gereja Keuskupan Ruteng bagi Keadilan Pariwisata di Labuan Bajo**

Peran publik teologi yang diperankan oleh Gereja Keuskupan Ruteng dapat terlacak dalam garis besar pendasaran dan prinsip-prinsip teologis-pastoral yang melandasi rencana dan aksi (reksa) pastoral di bidang pariwisata selama ini. Selain itu, pesan publik teologi yang dilaksanakan oleh Gereja lokal Keuskupan Ruteng dapat terlihat dalam praksis pastoral pariwisata selama ini yang benar-benar dilandasi oleh minat agar teologi katolik sungguh berkontribusi pada kehidupan publik dengan membawa pesan sosial Yesus Kristus bagi keadaban publik (Wilfred, 2010).

### ***Garis Besar Prinsip Teologis-Pastoral di Bidang Pariwisata***

Pastoral pariwisata yang diperankan oleh Gereja lokal Keuskupan Ruteng selama ini berangkat dari pesan publik pelayanan Yesus Kristus sendiri yang bersolider serta berbela rasa dengan orang-orang miskin, sakit, menderita, dan tertawan (Bdk. Luk 4:16-19) (Panitia



Sinode III Keuskupan Ruteng, 2017). Prinsip teologis-pastoral tersebut mengantar Gereja Keuskupan Ruteng untuk menjadi paguyuban murid-murid Kristus yang semakin profetik. Itu berarti, Gereja Keuskupan Ruteng, sesuai pesan dokumen Konsili Vatikan II, terutama *Gaudium et Spes*, semakin mendorong dirinya untuk memiliki kesadaran kolektif yang kritis (bdk. GS 45) terhadap praktik-praktik kekuasaan yang membudayakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta semakin berani melawan bentuk-bentuk kekuasaan yang eksploitatif dan menindas. Sebab praktik-praktik kekuasaan seperti itu secara kasat mata telah terbukti hanya memperkaya segelintir elit, tetapi di sisi lain mempermiskin dan membelenggu mayoritas warga.

Panggilan Gereja untuk semakin profetik seperti dijelaskan di atas hampir sesuai dengan gagasan teologi publik yang dikembangkan Felix Wilfred. Menurut Wilfred, tugas jemaat Kristen Asia adalah senantiasa mengusahakan agar pemerintah menyelenggarakan kekuasaan dengan baik dan adil. Bagi Wilfred, jemaat Kristen tidak bisa hanya menunggu otoritas pemerintah melakukan keadilan, tetapi berjuang agar pemerintah benar-benar melakukan keadilan tersebut. Di sinilah letak peran keterlibatan profetik orang Kristen dalam ruang publik Asia (Wilfred, 2010).

Dalam praksisnya, Gereja Keuskupan Ruteng menjalankan peran profetik dengan menjalankan model pastoral kontekstual-integral. Kontekstual berarti pelayanan pastoral tersebut sungguh-sungguh peka mempertimbangkan dan menjawab persoalan-persoalan keumatan yang konkret. Sementara integral berarti pelayanan pastoral gereja dijalankan secara seimbang antara aspek liturgi, pewartaan, koinonia, diakonia, dan martyria. Dalam hal ini, Gereja Keuskupan Ruteng menjauhkan diri dari model pelayanan yang hanya berpusat pada kesalehan ritual (liturgisentris), tetapi berusaha mengorientasikan pastoral sebagai praksis untuk melayani manusia dalam seluruh dimensinya, baik jasmani dan rohani. Justru di sinilah letak dimensi publik dari teologi dan pelayanan pastoral Kristiani. Dengan demikian, pelayanan pastoral dapat menjadi gerakan *caunter culture* terhadap kecenderungan sekularisme dalam masyarakat modern yang cenderung mendomestifikasi agama dan bahkan Allah di ruang privat (Madung, 2020). Gereja keluar dan membuat iman Kristiani berdampak secara publik. Iman dan pelayanan pastoral menjadi aktual dan relevan menjawab persoalan aktual manusia zaman ini. Dengan demikian, Allah tidak lagi dikurung di ruang privat, tetapi senantiasa membawa orang kepada pergumulan sosial yang konkret (Sunarko, 2016). Di sini, beriman atau hidup menggereja sungguh memiliki signifikansi sosial politik bagi keadilan publik.

### ***Penemuan Masalah dan Akar Masalah di Bidang Pariwisata***

Praksis pelayanan pastoral pariwisata yang dijalankan oleh Gereja Keuskupan Ruteng selama ini berangkat dari penemuan sejumlah masalah mendasar atau dampak destruktif pengembangan pariwisata selama ini. Masalah dan akar masalah mendasar tersebut ditemukan dalam sinode (sidang akbar) yang dilaksanakan oleh Gereja Keuskupan Ruteng sendiri. Dalam sinode tersebut, Gereja Keuskupan Ruteng melihat masalah utama dalam bidang pariwisata adalah terdapat fakta pengembangan pariwisata terutama di Labuan Bajo semakin mengancam eksistensi dan identitas masyarakat lokal. Dalam bidang ekonomi, ditemukan bahwa pengembangan pariwisata telah menyebabkan sentra-sentra ekonomi strategis dikuasai oleh orang asing dan penduduk lokal justru termarginalkan di tanahnya sendiri. Dari aspek budaya ditemukan bahwa pengembangan pariwisata telah membahayakan eksistensi kebudayaan lokal, sebab dalam kenyataan budaya asing telah menguasai gaya hidup sosial masyarakat. Jika dilihat dari perspektif teologi publik, dapat terlihat bahwa metode Gereja Keuskupan Ruteng dalam menemukan dan menganalisis dampak-dampak destruktif pengembangan pariwisata amat sesuai dengan salah satu pengandaian dalam pengembangan teologi publik, yaitu teologi publik yang baik senantiasa mengutamakan perspektif para korban dan usaha pemulihan keadilan bagi mereka dengan mengambil inspirasi profetik dari Kitab Suci (de Gruchy, 2007).

Secara konkret, Gereja Keuskupan Ruteng menyebutkan empat akar masalah dari persoalan pariwisata yang terjadi (Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, 2017). Empat akar masalah itu meliputi masalah personal, masalah berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, masalah berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan, serta masalah yang berhubungan dengan dimensi budaya. Secara personal ditemukan bahwa akar masalah yang menyebabkan terjadinya destruksi di bidang pariwisata adalah adanya sikap dan perilaku penduduk lokal yang bermental instan dan malas. Mereka gampang sekali ingin kaya namun tanpa usaha dan kerja keras. Akibatnya, mereka dengan gampang menjual tanah dan aset-aset produktif. Selain itu, mereka kurang memiliki kecukupan pengetahuan perihal pariwisata dan dampaknya-dampaknya. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan potensi-potensi lokal juga belum memadai. Malah mereka dengan mudah meniru apa yang datang dari luar, termasuk gaya hidup yang kontra dengan kebajikan budaya mereka sendiri. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini. Ketika responden ditanya apa saja faktor yang menyebabkan kurang keterlibatan masyarakat lokal dalam bisnis pariwisata di Labuan Bajo, sebanyak 60% informan menilai kurangnya keterlibatan masyarakat lokal

dalam tata kelola pengembangan pariwisata super premium Labuan Bajo adalah kurangnya sumber daya manusia.

Dalam aspek ekonomi, ditemukan bahwa akar masalah yang menyebabkan terjadinya destruksi di bidang pariwisata adalah semakin menguat dan menjalarnya tata kelola ekonomi kapitalistik. Sistem ekonomi tersebut terbukti lebih menguntungkan kelas pemodal dengan mengorbankan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini. Ditemukan 84 % informan menilai kurangnya akses kepada modal menyebabkan masyarakat lokal tidak dapat berperan aktif dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Akibatnya masyarakat lokal kurang memiliki kekuatan finansial dalam membangun usaha dalam bidang pariwisata.

Selanjutnya, secara politik, akar masalah yang menyebabkan terjadinya destruksi di bidang pariwisata adalah karena kebijakan politik yang memproteksi dan berpihak kepada pemodal atau korporasi daripada kepada kepentingan warga lokal. Sementara secara budaya, akar masalah yang menyebabkan terjadinya destruksi di bidang pariwisata adalah masih terdapat rasa inferioritas terhadap kebudayaan sendiri dan kurang memberikan penghargaan terhadap tradisi dan kebudayaan sendiri tersebut. Hal itu diperparah oleh melemahnya peran lembaga adat, hilangnya makna ritual adat karena sering hanya dijadikan sebagai komoditas (berorientasi uang) ekonomi semata.

Dalam perspektif teologi publik, cara kerja Gereja Keuskupan Ruteng dalam menemukan akar masalah dalam berbagai perspektif sebagaimana disebutkan di atas, secara otentik membahasakan dua dari beberapa tesis teologi publik (de Gruchy, 2007). Dua tesis tersebut adalah *pertama*, teologi publik yang baik memerlukan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang kebijakan dan masalah publik, sekaligus menangkap implikasi bagi warga, dan membuat kajian secara analitis serta kritik teologis. *Kedua*, teologi publik yang baik membutuhkan pendekatan interdisipliner di mana substansi dan proses berjalan secara seimbang.

### ***Praksis Pelayanan Pastoral di Bidang Pariwisata***

Prinsip pastoral yang mengedepankan profil Gereja sebagai komunitas profetik dan berbekal penemuan atas masalah serta akar masalah yang terjadi seperti telah diuraikan di atas, mendorong Gereja Keuskupan Ruteng terlibat secara konkret dalam usaha memperjuangkan model pengembangan pariwisata berkeadilan, terutama di Labuan Bajo. Praksis perjuangan pariwisata tersebut nyata dalam dua hal.

*Pertama*, secara kelembagaan. Dalam rangka memperjuangkan pariwisata berkeadilan, maka secara kelembagaan Gereja Keuskupan Ruteng membentuk Komisi Pariwisata dan Budaya. Tugas pokok komisi tersebut adalah membuat rancangan sekaligus melaksanakan pastoral di bidang pariwisata dan budaya. Pastoral di bidang pariwisata tersebut difokuskan agar mencegah terjadinya krisis identitas, relativisme moral, dan krisis iman umat beriman akibat kemajuan pariwisata. Selain itu, Komisi Pariwisata dan Budaya juga ditugaskan untuk merumuskan dan mewujudkan pastoral pariwisata dan budaya bagi ketahanan dan kontekstualisasi budaya lokal dengan nilai-nilai Injil. Semua usaha itu dijalankan melalui pendidikan dan pelatihan kepariwisataan dan berbagai aneka kegiatan rohani, seperti perayaan ekaristi, rekoleksi, dan katekese pariwisata. Pastoral pariwisata pada akhirnya diarahkan untuk semakin gigih memperjuangkan supaya kebijakan pemerintah di bidang-bidang pariwisata senantiasa menjamin kemerdekaan hidup, pelestarian kekayaan budaya, termasuk memberi akses dan partisipasi bagi warga lokal dalam pengembangan pariwisata (Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, 2017).

*Kedua*, pelaksanaan pastoral integral dalam bidang pariwisata. Pelaksanaan pastoral integral di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Gereja Katolik Keuskupan Ruteng secara nyata terkonfirmasi dalam temuan penelitian ini. Hampir sebagian besar informan mengklaim adanya keterlibatan pastoral Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam mengusahakan keadaban publik di bidang pariwisata Labuan Bajo. Keterlibatan tersebut secara nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas pastoral Gereja, yaitu dalam bidang liturgi, pewartaan (kerygma), karya persatuan (koinonia), pelayanan (diakonia), dan kesaksian (martyria). Dalam bidang liturgi, Gereja Keuskupan Ruteng ternyata menghadirkan diri dengan merayakan liturgi yang transformatif. Sebanyak 93 % informan menyatakan Gereja Keuskupan Ruteng menanggapi persoalan seputar industri pariwisata super premium Labuan Bajo dengan melaksanakan perayaan ekaristi, syering Kitab Suci, Ibadat Sabda, pemberkatan (sakramentali) di tempat atau dengan intensi agar pengembangan pariwisata yang ada senantiasa berpihak kepada masyarakat lokal.

Dalam bidang pewartaan, Gereja Keuskupan Ruteng menghadirkan diri denganewartakan pesan-pesan penyadaran berdasarkan inspirasi Injil. Sebanyak 98 % informan menyatakan Gereja Keuskupan Ruteng menanggapi persoalan seputar industri pariwisata super premium Labuan Bajo dengan memberikan katekese/kotbah tentang perlunya kewaspadaan terhadap berbagai ekses buruk yang timbulkan oleh industri pariwisata. Gereja juga memberikan informasi tentang pandangan Gereja terhadap pariwisata dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Gereja Keuskupan Ruteng juga hadir dalam pelayanan koinonia. Karya koinonia tersebut secara implementatif terlihat dalam pembentukan kelompok atau komunitas di sekitar wilayah wisata. Hampir semua informan (100%) menyatakan Gereja Keuskupan Ruteng memfasilitasi terbentuknya komunitas atau kelompok sebagai tempat untuk mendapatkan pencerahan atau advokasi dalam kaitan dengan keuntungan dan kerugian pariwisata super premium. Tidak hanya membentuk kelompok, tetapi juga senantiasa memperkuatnya. Hampir semua informan (100%) menyatakan Gereja Keuskupan Ruteng memperkuat hubungan antara kelompok, sehingga menjadi kekuatan bersama untuk memosisikan masyarakat lokal sebagai prioritas dalam pengembangan pariwisata.

Keterlibatan Gereja Keuskupan Ruteng dalam persolan seputar industri pariwisata super premium Labuan Bajo juga nyata dalam karya diakonia yang transformatif. Sejumlah 98 % informan menyatakan Gereja Keuskupan Ruteng melakukan karya diakonia transformatif dalam bentuk pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat sebagai wujud perhatian dan keberpihakan Gereja terhadap masyarakat lokal. Selain itu, dalam hal karya diakonia, 92% informan menyatakan Gereja Keuskupan Ruteng juga mendorong proses pemberdayaan masyarakat dengan bekerja sama dengan pihak profesional atau pihak profesional dari Gereja itu sendiri.

Gereja Keuskupan Ruteng juga melakukan karya martyria. Karya martyria tersebut nyata dalam dua hal. *Pertama*, memberikan kesaksian atau informasi tentang dampak pengembangan pariwisata yang oligarkis bagi masyarakat lokal. Sebanyak 96 informan menyatakan Gereja Keuskupan Ruteng memberikan kesaksian-kesaksian tentang dampak pengembangan pariwisata yang bersifat oligarkis terhadap masyarakat lokal. *Kedua*, dalam bidang martyria, Gereja juga menunjukkan contoh-contoh pengembangan kampung atau desa wisata alternatif yang berkelanjutan dan bersifat memberdayakan. Sebanyak 96% informan menyatakan Gereja Keuskupan Ruteng memberikan contoh pengembangan kampung dan desa wisata yang benar-benar berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat lokal.

Langkah-langkah perjuangan Gereja Keuskupan Ruteng bagi terlaksananya pengembangan pariwisata berkeadilan dan berkelanjutan seperti diuraikan tersebut secara *genuine* membahasakan beberapa tesis kunci dari teologi publik. Tesis-tesis itu antara lain (de Gruchy, 2007), *pertama*, pembembangan teologi publik memerlukan kondisi umat Allah yang secara sadar dan tercerahkan dipelihara dan diinspirasi oleh Sabda Allah, diilhami oleh refleksi teologis memadai, serta didukung oleh penghayatan liturgi yang berdaya transformatif. *Kedua*, teologi publik yang baik memerlukan spiritualitas yang

memungkinkan umat beriman mengalami pengalaman akan Tuhan, dengan manusia dan dengan alam ciptaan. Spiritualitas yang sama juga menjadi daya penggerak untuk senantiasa mengalami kerinduan akan keadilan dan keutuhan, serta menjadi inspirasi bagi usaha melawan semua yang menghalangi kesejahteraan bersama.

## **Penutup**

Pengembangan pariwisata Labuan Bajo, Flores Barat tentu banyak membawa perubahan dan kemajuan. Namun di balik semuanya itu, terdapat patologi amat mendasar, terutama terkait nasib masyarakat lokal. Penelitian ini membuktikan bahwa pengembangan pariwisata super premium Labuan Bajo telah secara signifikan mendestruksi masyarakat lokal, terutama dalam aspek ekonomi, religi dan budaya, serta lingkungan hidup. Laju kemajuan yang diusung hampir linear dengan penguasaan sumber daya dan ruang hidup warga lokal, destruksi budaya, degradasi lingkungan, serta berbagai kompleksitas persoalan lainnya.

Berhadapan dengan destruksi pembangunan pariwisata seperti itu, Gereja dipanggil untuk memperjuangkan nasib masyarakat lokal. Keterlibatan Gereja (agama) dalam ruang publik amat diperlukan. Secara spesifik, dalam konteks pengembangan pariwisata Labuan Bajo, maka Gereja Keuskupan Ruteng sebagai komunitas profetik, perlu terus menerus memainkan peran publik terutama untuk menghadapi narasi dan praktik pembangunan pariwisata yang rentan memarginalkan masyarakat lokal. Narasi teologis yang terlibat perlu terus dilakukan terutama untuk membongkar kesadaran palsu akan kemajuan pariwisata yang hanya menopang kejayaan hidup orang kaya dan penguasa. Selanjutnya, narasi dan keyakinan publik teologi, mesti sanggup menginspirasi Gereja dan umat beriman untuk memperjuangkan keadilan pariwisata bagi warga lokal. Dalam hal ini, pesan publik teologi mesti menyata dalam praksis pastoral pariwisata yang integral, kontekstual dan relevan.

Akhirnya, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng perlu secara aktif menawarkan konsep dan visi pengembangan pariwisata yang lebih holistik, berbudaya, partisipatif dan berkelanjutan. Dalamnya kepentingan masyarakat lokal dalam segala aspeknya mesti mendapat porsi utama. Pengembangan pariwisata harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat lokal, bukan sebaliknya masyarakat lokal dan segala kepentingannya dikorbankan demi kemajuan pariwisata.

## Daftar Pustaka

- Afioma, G. (2016). Pencaplokan dan Ketidakadilan Pariwisata. In C. P. Dale (Ed.), *Pariwisata, Pembangunan dan Keadilan Agraria di Flores* (pp. 5–12).
- Ama, K. K. (2022). Peningkatan Ruas Jalan di Manggarai Barat Merusak Puluhan Hektar Lahan Warga. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/16/peningkatan-ruas-jalan-di-manggarai-barat-merusak-puluhan-hektar-lahan-warga>.
- Berg, B. L. (2001). *Qualitative Research Method for the Social Sciences*. Allyn & Bacon.
- Bevans, S. B. (2002). *Models of Contextual Theology*. Orbis Books.
- Cole, S. (2017). Water worries: An intersectional feminist political ecology of tourism and water in Labuan Bajo, Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 67, 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.07.018>
- Dallen J. Timothy & Cevat Tosun. (2003). Arguments for community participation in the tourism development process. *Journal of Tourism Studies*, 14(2), 2–15.
- De Gruchy, J. (2007). Public Theology as Christian Witness: Exploring the Genre. *International Journal of Public Theology*, 1(1), 26–41. <https://doi.org/10.1163/156973207x194466>
- Febriana, Y. E., & Pangestuti, E. (2018). Analisis Dampak Pengembangan Kepariwisata dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi dan Sosial Budaya Lokal Masyarakat. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 61(4), 141–150. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2633>
- Firmanto, A. D. (2017). Kehadiran Gereja Di Ruang Publik: Perspektif Eklesiologis Di Dalam Memandang Keadaan Akhir-Akhir Ini. *Seri Filsafat & Teologi*, 27(26), 272–285. <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/77>
- Haire, J. (2007). *Public Theology — A Purely Western Issue ? Public Theology in the Praxis of the Church in Asia* 1. 48–61.
- Hamid, D. (2016). Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata ( Studi Pada Masyarakat Sekitar Wisata Wendit , Kabupaten Malang ). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 30(1), 74–78.
- Helen Klimmek. (2013). *An examination of the barriers to local community participation in the dive tourism industry in Flores, Indonesia*. King's College London.
- Herry-Priyono, B. (2004). Marginalisasi ala Neoliberal. *BASIS*, No. 05-06, Tahun Ke-53, 18–20.
- Ketut, I. G. P. & I. S. D. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi.
- Kiwang, A. S., & Arif, F. M. (2020). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(2), 87. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i2.7290>

- Kodir, A., Tanjung, A., Astina, I. K., Nurwan, M. A., Nusantara, A. G., & Ahmad, R. (2020). The dynamics of access on tourism development in Labuan Bajo, Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 29(2), 662–671. <https://doi.org/10.30892/gtg.29222-497>
- Kurniawan, A. R. & Y. P. (2013). Dampak Bisnis pariwisata Terhadap Masyarakat Lokal: Studi Dampak Bisnis Pariwisata Terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 18(1), 116–126.
- Levesque, M. R. (2014). *Political Theology Versus Public Theology: Reclaiming the Heart of Christian Mission* (Issue October). <http://ir.lib.uwo.ca/etd/2452>
- Madung, O. G. (2020). Provokasi Kasih. In M. R. & F. Den (Ed.), *Omnia in Caritate* (pp. 153–163). Obor.
- Nudan, P. W. (2020). *MASALAH KAPITALISASI AIR DI DESA GORONTALO*. STFK Ledalero.
- Pakpahan, B. J. (2020). Editorial: Tema Teologi Publik di Tengah Krisis. *Theologia in Loco*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.55935/thilo.v2i1.188>
- Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng. (2017). *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng Pastoral Kontekstual Integral*. asdaMEDIA.
- Riyadi, A. (2021). Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama Di Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali. *Jurnal SMaRT*, 3(2), 2017.
- Rusmadi. (2016). Ecosophy Islam: Studi Tematis-Kontekstual Nilai-Nilai Etika Lingkungan Dalam Islam. *Jurnal SMaRT*, 2(2), 237–284. <http://arxiv.org/abs/1011.1669v0><http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Sengketa Lahan Pariwisata, Warga Labuan Bajo Ditangkap Polisi*. (2022). DetikTravel. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6046217/sengketa-lahan-pariwisata-warga-labuan-bajo-ditangkap-polisi>.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung). Alfabeta.
- Sunarko, A. (2016). Berteologi bagi Agama di Zaman Post-Sekular. *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 15(1), 23. <https://doi.org/10.26551/diskursus.v15i1.17>
- Tedy N. (2022, April). BPO Labuan Bajo Flores Main Patok Sana Sini di Lahan Warga. *Floresku.Com*. <https://floresku.com/read/bpo-labuan-bajo-main-patok-sana-sini-di-lahan-warga>
- Tolak Penggusuran, Warga Labuan Bajo Ditangkap Polisi*. (2022). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220421210353-12-788052/tolak-penggusuran-warga-labuan-bajo-ditangkap-polisi>
- Walpole, M. J., & Goodwin, H. J. (2000). Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 27(3), 559–576. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(99\)00088-2](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00088-2)
- Wilfred, F. (2010). *Asian Public Theology: Critical Concerns in Challenging Times*. ISPCK.